PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LUKMAN F. LAISA M.**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **451045**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 36.859.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 7.500.000.000
2. Tanah Seluas 2.258 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, Rp. 225.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 477 m2/292 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 21.234.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/289 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 347.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1999, WARISAN Rp. 20.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX3 MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 188.000.000
3. MOBIL, MAZDA BIANTE MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 139.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 1.405.600.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 4.226.177.196**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**42.838.577.196**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**42.838.577.196**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.